

UPAYA PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF

19

Venti Eka Satya

Abstrak

Pada tahun 2018 realisasi investasi asing di Indonesia mengalami penurunan 8,8% dari tahun sebelumnya, akibat kurang kondusifnya iklim investasi di Indonesia. Tulisan ini membahas permasalahan dalam dunia investasi di Indonesia serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Permasalahan klasik yang kerap dikeluhkan para investor adalah inkonsistensi regulasi. Faktor lainnya adalah persoalan pajak, tenaga kerja, hal yang berkaitan dengan izin lahan, serta kurang memadainya kualitas maupun kuantitas infrastruktur. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut di antaranya adalah dengan mengadakan 'online platform' untuk mempermudah perizinan dan administrasi investasi, memberikan keringanan pajak, meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan sistem pengamanan, serta perbaikan infrastruktur.

Pendahuluan

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun 2018, nilai realisasi investasi asing di Indonesia adalah Rp392,7 triliun, turun 8,8% dari tahun 2017. Menurut Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat ke-73 dalam kemudahan berinvestasi 2019. Peringkat Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Asean lain, seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Sementara dalam hal memulai bisnis, Indonesia berada pada peringkat ke-134.

Menurut Kepala BKPM, iklim investasi di Indonesia tahun 2018

agak berat. Di antara faktor penting yang memengaruhi adalah gejolak nilai tukar mata uang rupiah di awal kuartal II 2018 dan ancaman perang dagang di pasar global. Tidak hanya Indonesia, mata uang negara-negara berkembang seperti Argentina, Turki, dan Filipina juga mengalami tekanan terhadap dolar AS yang menguat. Menghadapi kondisi perang dagang, Indonesia telah melakukan langkah antisipatif seperti memberikan insentif khusus bagi pabrik dan industri baik di hulu maupun hilir. Pemberian insentif ini dilakukan mengingat 40% investasi nasional berada di sektor industri. (Tirto.id, 12 Juli 2012).



Selama ini, hambatan utama Indonesia dalam menarik investor asing adalah inkonsistensi regulasi. Regulasi yang berubah-ubah, tumpang tindih, serta kontradiktif baik antara kementerian dan lembaga maupun antar daerah. Faktor lainnya adalah persoalan pajak, tenaga kerja, hal yang berkaitan dengan perizinan lahan, kurangnya memadainya infrastruktur nasional baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek. Tulisan ini membahas permasalahan dalam dunia investasi di Indonesia serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya.

Pentingnya Investasi dalam Perekonomian

Upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengeluaran pada sektor publik, mengingat kemampuan fiskal pemerintah yang sangat terbatas. Untuk itu diperlukan peran serta pihak swasta dalam melakukan penanaman modal. Investasi merupakan salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Tambunan (2010), dalam kondisi kemampuan fiskal pemerintah yang terbatas, sangat sukar membayangkan pemerintah dapat menutupi ketimpangan fiskal dalam waktu dekat, kecuali investasi swasta dapat ditarik ke pasar atau pada ekonomi daerah yang minim penerimaan. Selanjutnya dalam konteks pembangunan regional, investasi memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. (Aminah, 2016).

Investasi merupakan indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan

ekonomi suatu negara. Melalui investasi, akan tersedia berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya peran investasi maka pemerintah perlu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik minat investor.

Investasi juga merupakan salah satu komponen penting dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia, porsi investasi dalam PDB masih relatif kecil, namun demikian investasi berperan penting dalam permintaan agregat. Peran tersebut terlihat dalam; (a) pengeluaran investasi yang rata-rata memiliki sifat yang tidak stabil sehingga mudah berfluktuasi, hal ini dapat menyebabkan terjadinya resesi dan *boom*; (b) investasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi serta perbaikan produktivitas tenaga kerja, karena pertumbuhan ekonomi juga sangat tergantung pada tenaga kerja dan kapital.

Yunan (2012) menyatakan, terkait dengan peran investasi dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi, secara umum telah lama menjadi pusat perhatian para ekonom, dari Adam Smith, Solow, hingga ekonom terkini seperti David Romer. Perhatian tersebut menjadi kian intensif setelah ditemukannya fakta empiris bahwa tingkat investasi di sejumlah negara telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap wilayah (negara atau regional) senantiasa berusaha untuk meningkatkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor

asing. Begitupun dengan Indonesia yang terus berusaha meningkatkan investasinya.

Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Investasi

Sukses tidaknya suatu negara dalam menarik arus dana investasi dipengaruhi baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi, di antaranya:

Pertama, pemberian fasilitas yang mendorong adanya investasi seperti pembebasan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan mengakses bahan baku.

Kedua, stabilitas ekonomi dan politik, hal ini akan berpengaruh terhadap nilai tukar serta kepastian dan keamanan usaha. Nilai tukar yang relatif stabil terutama dibutuhkan oleh investor yang berorientasi pada pasar luar negeri. Iklim politik dan faktor keamanan negara penting untuk menjamin ketentraman hidup dan keamanan usaha serta kekayaan investor.

Ketiga, peraturan perundang-undangan seperti aturan perizinan, dan lalu lintas devisa yang berlaku juga menjadi perhatian bagi investor. Peraturan devisa di negara yang tidak menghalangi penanam modal untuk memindahkan kekayaan dan keuntungannya ke luar negeri lebih menarik bagi investor.

Keempat, faktor lain juga menentukan dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif adalah infrastruktur yang menunjang dan memadai. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi

komoditi ekonomi. Telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen penting dalam proses produksi dari sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor produksi.

Kelima, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar saja tak cukup untuk menarik investor. Potensi itu harus dibarengi ketersediaan tenaga kerja berkualitas, terampil, kreatif, dan murah yang dikelola dengan baik.

Permasalahan Investasi dan Upaya Mengatasinya

Menurut Direktur Fasilitas Promosi Daerah BKPM, ada lima hambatan berinvestasi di Indonesia yang kerap dikeluhkan para investor. Hambatan tersebut terkait dengan inkonsistensi peraturan/kepastian hukum, perpajakan, kualitas tenaga kerja, ketersediaan lahan dan hambatan izin pembangunan, serta kualitas infrastruktur. (Tirto.id, 12 Januari 2012)

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang kerap dikeluhkan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam rangka menciptakan keamanan dan kepastian hukum berusaha, BKPM telah bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menciptakan keamanan investasi melalui Pedoman Kerja BKPM-Polri tentang Jaminan Keamanan Berinvestasi di Indonesia. Adapun isi dari kesepakatan tersebut adalah kedua instansi diharapkan saling membantu guna menciptakan iklim investasi yang

kondusif di Indonesia. (Finansial. bisnis.com, 5 September 2018)

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, pemerintah melalui Kemnaker terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi melalui strategi *triple skilling*, yakni *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling*. Bagi tenaga kerja yang belum punya keterampilan dapat mengikuti program *skilling* agar punya keahlian di bidang tertentu. Bagi tenaga kerja yang telah memiliki *skill* dan membutuhkan peningkatan akan masuk program *upskilling*, sedangkan yang ingin beralih *skill* dapat masuk ke program *reskilling*. Adanya kepastian pengupahan, jaminan sosial, hubungan industrial yang baik serta perubahan paradigma *Mayday* yang makin kondusif diharapkan akan mampu menarik investasi ke Indonesia. (ekonomi. bisnis. 14 Maret 2019).

Pada awal tahun 2019 BKPM melakukan perbaikan terhadap sistem perizinan yang terkoneksi, termasuk melalui platform Koordinasi Pengawasan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap). Platform tersebut akan membantu pemerintah pusat dalam mengawal pelaksanaan investasi hingga di tingkat pemerintah daerah (pemda). Hal ini sesuai dengan yang diingatkan Presiden Joko Widodo, yakni menjaga investasi dari hulu ke hilir. (Republika.co.id. 12 Maret 2019). Selain itu BKPM menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS), Pengawasan Investasi, Pemantauan Realisasi Investasi, Perencanaan Penanaman Modal, serta Kerja Sama Penanaman Modal. (investindonesia, 19 Maret 2019).

Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim bisnis yang kondusif dengan memberikan fasilitas fiskal dan kemudahan perizinan. Pemerintah semakin serius dan gencar mendorong kebijakan hilirisasi industri karena dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Saat ini, Indonesia termasuk dalam empat negara Asia (selain China, Jepang dan India) yang memiliki nilai tambah sektor manufaktur tertinggi di dunia. Nilai tambah industri nasional meningkat hingga USD 34 miliar, dari tahun 2014 sebesar USD 202,82 miliar, menjadi USD 236,69 miliar pada tahun 2018.

Terkait sektor perpajakan, pada tahun 2015 Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturan mengenai *tax allowance* dan *tax holiday*, yang merupakan insentif keringanan pajak. Akan tetapi fasilitas pajak tersebut tidak terlalu banyak dimanfaatkan oleh investor karena ketatnya persyaratan dan kriteria yang diterapkan. Pemberian fasilitas pajak sesungguhnya merupakan dilema, pemerintah saat ini tengah menghadapi persaingan tarif pajak global. Bila mengikuti tren penurunan tarif pajak yang tengah dilakukan oleh banyak negara di dunia, maka akan berimbas pada neraca fiskal. Bila pemerintah mengorbankan penerimaan pajak, dikhawatirkan negara akan kekurangan anggaran untuk menstimulus perekonomian. (Kompas.com, 6 Maret 2018).

Sejak tahun 2015, Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Salah satu megaproyek infrastruktur utama adalah pembangunan jalan dan jalan tol. Hingga tahun 2018,

pemerintahan telah menyelesaikan 3.387 kilometer jalan nasional dan masih akan bertambah hingga 4.119 kilometer di 2019. Selain itu, sejumlah infrastruktur lain seperti bendungan dan jaringan irigasi juga dibangun dengan masif. (cnbcindonesia.com, 17 Februari 2019)

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah nampaknya belum mampu meningkatkan nilai investasi. Bila melihat penurunan nilai investasi di tahun 2018 yang cukup memprihatinkan, bisa jadi permasalahan eksternal seperti perang dagang di pasar global dan tekanan dolar AS merupakan penyebab utamanya.

Penutup

Turunnya nilai realisasi investasi asing pada tahun 2018, telah menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi ini ditenggarai akibat gejala nilai tukar rupiah serta perang dagang di pasar global. Akan tetapi bila dilihat dari peringkat kemudahan bisnis, ranking Indonesia memang cukup memprihatinkan, bahkan Indonesia tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN.

Permasalahan utama yang membuat Indonesia tertinggal dalam menjaring investasi asing adalah tumpang tindih regulasi, ketidakpastian hukum, pajak, tenaga kerja, perizinan, serta infrastruktur. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut sepertinya belum efektif dan tidak mampu meningkatkan minat para investor. Untuk itu pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tersebut dan mengevaluasi penerapannya di lapangan.

Peran DPR sangat dibutuhkan untuk mengawasi efektifitas kinerja

permerintah dalam meningkatkan investasi. DPR dan pemerintah perlu duduk bersama untuk memikirkan solusi terbaik bagi permasalahan investasi ini. Dengan melihat berbagai faktor penghalang investasi tersebut, perlu disusun regulasi khusus untuk mendorong tumbuhnya investasi nasional yang sifatnya komprehensif dan mengikat, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi investor. Karena sesungguhnya investasi pihak swasta sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Referensi

- Aminah, Siti. (2016). "Analisis Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Jambi", *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4 No. 2, hal. 120-121.
- "Bangun Daya Saing RI", *Kompas*, 14 Maret 2019, hal. 17.
- "Bidik Investasi Double Digit, BKPM Siapkan Kopi Mantap", <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/03/12/po8pom383-bidik-investasi-double-digit-bkpm-siapkan-kopi-mantap>, diakses 21 Maret 2019.
- "BKPM Catat 5 Keluhan Investor Soal Hambatan Investasi", 12 Januari 2018, <https://tirto.id/bkpm-catat-5-keluhan-investor-soal-hambatan-investasi-cDo1>, diakses 21 Maret 2019.
- "BKPM Ingatkan Pentingnya Kepastian Hukum Bagi Investor", <https://finansial.bisnis.com/read/20180905/9/835515/bkpm-ingatkan-pentingnya-kepastian-hukum-bagi-investor>, diakses 20 Maret 2019.

"Dilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus Investasi", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/101712226/dilema-pajak-sebagai-sumber-pendanaan-dan-stimulus-investasi>.

"Hambatan Berinvestasi di Indonesia", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180130204243-4-2980/ini-hambatan-berinvestasi-di-indonesia>, diakses 21 Maret 2019.

"Kepala BKPM: Iklim Investasi di Indonesia Tahun Ini Agak Berat", 12 Juli 2018, <https://tirto.id/kepala-bkpm-iklim-investasi-di-indonesia-tahun-ini-agak-berat-cN2p>, diakses 20 Maret 2019.

Koordinasi Pengawasan Investasi, "13 March-14 March 2019-ICE BSD", <https://www3.investindonesia.go.id/id/kalender-kegiatan>, diakses 19 Maret 2019.

"Meski Infrastruktur Dibangun Investasi Asing Malah Lesu" <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190217185136-17-55975/meski-infrastruktur-dibangun-investasi-asing-malah-lesu>, diakses 20 Maret 2019.

Yunan, Zuhairan Y. (2012). "Investasi Swasta di Indonesia", *Jurnal Signifikan*, Vol.1 No.2, hal. 151-152.



Venti Eka Satya
venti.eka@dpr.go.id

Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak., menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi - Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, dan pendidikan S2 pada Jurusan Akuntansi - Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda dengan bidang kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2013" (2014), "Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara: Manajemen Utang Pemerintah dan Permasalahannya" (2015), dan "Peran Akuntansi Forensik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.